

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM Mikro yang bergerak dibidang Batik, makanan dan jamu belum merasakan dampak negatif dari adanya MEA. Hal ini disebabkan karena Batik, Makanan dan jamu merupakan produk khas yang tidak bisa dibuat oleh pabrik dan membutuhkan bahan-bahan yang khusus yang tentunya pembuat satu dengan yang lain mempunyai rasa yang berbeda pula. Namun pelaku UMKM mikro yang bergerak dibidang kerajinan tas, sepatu dan Sandal serta pakaian jadi sangat merasakan dampaknya. Pasalnya sekarang banyak produk-produk tas, sepatu dan sandal serta pakaian jadi dari China yang beredar di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan harga yang lebih rendah. Walaupun kualitas tidak bisa disamakan. Hal ini yang membuat para pelaku usaha kerajinan agar tergeser dengan produk-produk pabrik yang didatangkan dari China.

4. 2 Pengembangan UMKM Sektor Mikro Pasca ASEAN *Community* 2015

ASEAN *Community* yang dilaksanakan tahun 2015, merupakan sebuah tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. dalam hal ini persiapan-persiapan harus segera dilakukan guna berkontribusi dalam pasar bebas ASEAN. Produk-produk unggulan harus dipersiapkan, sumber daya manusia harus dilatih agar UMKM mikro tetap bisa bersaing di pasar bebas ASEAN.

UMKM sektor mikro merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian umumnya di Indonesia dan khususnya di Jawa timur. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya

	dan UMKM 2016	Februari 2016		
2	Gelar Produk Unggulan dan Peluang Bisnis	25 s/d 28 Februari 2016	Bencoolen Mall, Kota Bengkulu	10
3	International Furniture and Craft fair Indonesia Iffina	10 s/d 13 Maret 2016	Hall B Jakarta Convention Center (JCC)	10
4	Pameran Gelar Inovasi UMKM, Koperasi dan pkbl expo 2016	24 s/d 27 Maret 2016	Java Supermall Semarang	8
5	Pameran Pasar Rakyat Gresik 2016	29 s/d 31 Maret 2016	Alun-alun Gresik	30
6	Pameran Pasar Rakyat Nganjuk 2016	15 s/d 17 April 2016	Gor Bung Karno Nganjuk	30
7	Pameran Gelar produk Unggulan UMKM dan Investasi Daerah 2016	21 s/d 24 April 2016	Nagoya Hill Shopping Mall, Batam	6
8	Pameran Tenun, Batik dan Bordir Nusantara 2016	04 s/d 8 Mei 2016	Grand Ball Room Dyandra Convention Center (Ex. Exhibition Hall Gramedia Expo) Jl. Basuki Rachmad Surabaya	9
9	Pameran BBGRM XIII dan HKG PKK KE-44 Provinsi Jawa Timur TAHUN 2016	11 s/d 13 Mei 2016	Alun-alun Tuban	3
10	Pameran Peringatan HUT ke-36 DEKRANAS 2016	17 s/d 20 Mei 2016	Gedung Smesco Jakarta	1
11	Pameran Gebyar Pasar Produk Daerah (GPPD) Expo 2016	26 s/d 29 Mei 2016	Grand City Surabaya	10
12	Pameran Gerbyar UMKM, Koperasi, PKBL dan Produk Unggulan Daerah	26 s/d 29 Mei 2016	Jogya Expo Center Yogyakarta	10
13	Pameran Indonesia Fashion Accesories dan Craft (IFAC) EXPO 2016	26 s/d 29 Mei 2016	Trans Studio Mall Makasar	4
14	Pameran HARKOPNAS EXPO 2016	21 s/d 24 Juli 2016	Lapangan Gubernur Jambi, Jl. A. Yani No.1 Telanaipura. Kota Jambi	6
15	Pameran Gelar Produk Unggulan UMKM dan Investasi Daerah dalam rangka MTQ Nasional XXVI TH 2016	30 Juli s/d 02 Agustus 2016	Mall Lombok Epicentrum Mataram, Nusa Tenggara Barat	8
16	Pameran Cooperative FAIR ke-13 tahun 2016	10 s/d 14 Agustus 2016	Gedung Banceuy Permai Cikapundung Barat No.8	1

menimbulkan dapat diambil sorotannya, yakni sejauh mana pemerintah berperan dalam hal pendampingan pemasaran produk unggulan dari UMKM mikro Jawa Timur.

Pemasaran merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Jawa Timur. Pasalnya pemasaran yang diberikan hanya berfokus pada pameran dan galeri saja. Sedangkan agar bisa ikut pameran harus tergabung dalam anggota CTH. Dan untuk masuk dalam anggota ini prosesnya sangat rumit. Sehingga semakin sedikit pelaku UMKM khususnya sektor mikro yang menjadi anggota CTH yang berakibat sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas juga tidak menyebar luas.

Seharusnya selain memberikan fasilitas pemerintah Jawa Timur juga melindungi para pelaku usaha khususnya mikro dengan sebuah regulasi agar pemasaran produk UMKM mikro tidak tersaingi dengan produk-produk dari luar negeri yang masuk di Indonesia.

Dari pemaparan di atas dapat dianalisis bahwa, tahapan pemerintah dalam menyambut MEA sesuai dengan teori integritas ekonomi menandakan bahwa, Provinsi Jawa Timur masih dalam tahapan *Preferential Trade Arrangements* yang maksudnya adalah menurunkan hambatan-hambatan perdagangan antara negara-negara anggota maupun non-anggota. Hal ini dibuktikan dengan telah menyebar luasnya produk-produk barang jadi pakai seperti tas, sepatu dan dompet serta pakaian jadi di pasar domestik. Padahal para pelaku UMKM mikro Jawa Timur belum siap akan hal ini. Masuknya barang-barang tersebut pada pasar domestik berdampak pada pemasaran produk para pelaku UMKM mikro di Jawa Timur.

“ya itu tadi mbak masalah proses ekspor, ya izinnnya jangan rumit-rumit lah kita kan usaha kecil kalau gak bisa ekspor kapan produk kita dikenal?”

Dari berbagai ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha UMKM Mikro masih mengalami kesulitan saat proses ekspor barang. Hal ini disebabkan karena proses pemenuhan syarat yang sangat rumit dan juga bertele-tele. Misalnya dalam proses ekspor barang yang berbau makanan, pelaku UMKM Mikro harus mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan proses memperolehnya minimal 3 bulan untuk masa tahun. Apabila pelaku UMKM Mikro mengeluarkan uang untuk membayarnya membutuhkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan dalam proses selama satu bulan. Permasalahan seperti ini yang harus diperhatikan agar keberlangsungan proses produksi hingga proses pemasaran bisa berlanjut demi kesejahteraan para UMKM mikro.

Selain itu KUR yang menjadi strategi bagi penanganan permodalan usaha, ternyata sampai saat ini masih menggunakan sistem agunan bagi para peminjamnya. Padahal para pelaku UMKM mikro banyak yang tidak mempunyai agunan seperti sertifikat sawah atau tanah lainnya. Pelaku Usaha Mikro hanya mempunyai rumah dan tidak mungkin rumah yang menjadi sangat berharga ini menjadi agunan untuk permohonan pinjaman bagi para pelaku usaha. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa KUR bagi pelaku usaha UMKM ternyata belum tepat sasaran kepada para pelaku usaha sektor mikro.